

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan daerah di Indonesia saat ini dimulai dari pemerintahan desa. Menurut Fadli, G. M (2010) dalam rangka mewujudkan tujuan pembangunan nasional yang baik, pemerintah memfokuskan untuk memberikan perhatian lebih dalam pembangunan di pedesaan. Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki potensi besar untuk dikembangkan. Hal itu perlu didukung dengan adanya perubahan mekanisme dalam mengelola sistem pemerintahan. Salah satunya dengan adanya reformasi birokrasi. Terjadinya perubahan tata kelola pemerintahan dari waktu ke waktu tidak lain karena adanya keinginan untuk membangun negara berkemajuan. Didalam upaya perbaikan tersebut terjadi pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah yang akan turut memperbesar kesempatan untuk lebih menstabilkan sistem pemerintahan.

Sebagai suatu proses yang saling bekerja satu sama lain atau berkesinambungan, pembangunan nasional sangat di butuhkan di setiap daerah. Menurut Permana (2014) pembangunan nasional disusun secara terencana, terarah dan terpadu dalam mewujudkan tujuan seperti yang telah ditetapkan dalam pembukaan UUD 1945. Kemudian pembangunan nasional diselenggarakan pemerintah dan dijabarkan dalam kegiatan yang bersifat operasional, untuk di laksanakan oleh perangkatnya mulai dari tingkat pusat dan tingkat daerah secara keseluruhan di wilayah Indonesia. Tujuan pembangunan nasional adalah untuk menciptakan masyarakat yang adil dan makmur

yang sebagaimana tercantumkan dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945. Pembangunan nasional merupakan bentuk dari pengamalan Pancasila yang didalamnya antara masyarakat dan pemerintah saling berkesinambungan dalam pelaksanaan pembangunan nasional. Saling melengkapi dan kerjasama yang baik antara masyarakat dan pemerintah merupakan kunci untuk keberhasilan pembangunan nasional.

Dalam Permana, R. (2014) pembangunan nasional bertumpu pada peningkatan ekonomi masyarakat. Pengutan pada bidang ekonomi merupakan titik penggerak utama pembangunan dengan meningkatkan kualitas sumber daya manusia, saling berkaitan dengan pembangunan dibidang lainnya agar terdapat keselarasan, serasi dan keseimbangan guna mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional. Keberhasilan pembangunan nasional tentunya pemerintah dan masyarakat mempunyai kewajiban untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar dapat mengelola dan menggali potensi yang ada.

Untuk menuju pembangunan nasional itu sendiri dibutuhkan kesadaran masyarakat Indonesia yang meliputi daerah sampai dengan pusat guna untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Salah satu komposisi yang terpenting dalam pembangunan daerah adalah pembuatan pembangunan yang berpusat di desa, perhatian yang besar terhadap pedesaan itu didasarkan pada kenyataan bahwa desa merupakan tempat berdiamnya sebagian besar masyarakat Indonesia. Kedudukan desa dan masyarakat desa merupakan dasar landasan kehidupan bangsa dan Negara Indonesia.

Pedesaan merupakan tempat dimana masyarakat desa memiliki kekuasaan dalam menjalankan pemerintahannya sendiri. Desa identik dengan masyarakat ramah dengan interaksi sosial yang baik. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa perangkat desa terdiri dari sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan perangkat teknis. Dalam mengurus kepentingan masyarakat harus berdasarkan dengan adat-istiadat dan asal-usul setempat yang dihormati dan diakui oleh Negara. Pembangunan pedesaan layak fokus dan mengarah pada peningkatan kesejahteraan masyarakat desa tersebut.

Pemberdayaan masyarakat pedesaan dapat dilihat sebagai upaya mempermudah pembangunan pedesaan melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk memberdayakan masyarakat didesa, dan sebagai upaya untuk mempercepat pembangunan ekonomi daerah menjadi efektif dan kokoh. Pembangunan pedesaan bersifat multiaspek, sehingga perlu adanya keterkaitan dengan bidang aspek diluar pedesaan dan sektor sehingga dapat menjadi pondasi yang kuat bagi pembangunan nasional. Untuk mewujudkan kesejahteraan, pemberdayaan, dan kemandirian masyarakat perlu adanya dukungan dari pihak pengelolaan pembangunan yang partisipatif pada tatanan pemerintah yang jujur, bertanggung jawab, terbuka, dan demokrasi. Menurut Kartasmita, G. (1995) sedangkan pada susunan masyarakat perlu adanya perkembangan mekanisme yang memberikan peluang baik terhadap proses keputusan masyarakat dalam kepentingan bersama.

Hal yang tidak kalah penting untuk mendukung keberhasilan tujuan yang hendak dicapai baik berbentuk program atau kegiatan adalah sumber daya manusia yang

tersedia. Sumber daya manusia menjadi komponen penting yang turut menyumbang berhasil tidaknya program atau kegiatan tersebut dilaksanakan.

Pemberdayaan masyarakat desa merupakan salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat, melalui beberapa program atau kegiatan antara lain posyandu, peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, pembangunan lembaga keuangan desa, pembangunan usaha ekonomi desa, serta kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam peningkatan hasil produksinya.

Kegagalan atau keberhasilan dalam peningkatan pembangunan di desa sangat ditentukan dari kinerja kepala desa itu sendiri, sejauh mana kepala desa dalam menggerakkan, memotivasi, mengarahkan, merencanakan serta berkomunikasi baik kepada masyarakat desa, agar dalam periode kepala desa dapat dikatakan baik dalam memberikan arahan serta koordinasi bagi perangkat pemerintah di desa dan masyarakat desa. Kepala desa berperan penting dalam memajukan desa agar menjadi desa lebih baik dan modern. Untuk mencapai tujuan pemerintah dalam hal pemberdayaan masyarakat maka diperlukan kerja sama baik dengan pimpinan dan masyarakat desa. Maka dengan adanya tujuan ini diharapkan masyarakat dapat berperan aktif dan terlibat secara langsung dalam pelaksanaan kegiatan desa, program desa, serta pemberdayaan masyarakat di desa. Dalam proses pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa diposisikan dalam posisi ganda yaitu sebagai obyek dan subyek dalam pemberdayaan masyarakat.

Sebagai obyek dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa memiliki hak untuk mendapatkan manfaat dari kemajuan dan hasil yang telah dicapai dari proses

pemberdayaan masyarakat. Sedangkan dari sisi subyek dalam pemberdayaan masyarakat, masyarakat desa memiliki tanggung jawab untuk memberikan kontribusi dan partisipasinya dalam pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dua posisi ganda maka usaha pemberdayaan masyarakat tersebut sangat diperlukan kerjasama dan komunikasi yang baik antara pemimpin dan yang dipimpin.

Tujuan pembangunan Kabupaten Sleman merupakan implementasi dari misi salah satunya adalah Meningkatkan penguatan sistem ekonomi kerakyatan, aksesibilitas dan kemampuan ekonomi rakyat, serta penanggulangan kemiskinan, Memantapkan dan meningkatkan kualitas pengelolaan sumberdaya alam, penataan ruang, lingkungan hidup dan kenyamanan. Sesuai dengan tujuan pembangunan pemerintah Kabupten Sleman tersebut menarik untuk mengetahui pelaksanaan pembangunan di wilayah desa, dengan adanya misi tersebut pemerintah ingin membuat masyarakat menjadi masyarakat yang mandiri, lebih sejahtera, berbudaya dan terintegrasikan. Penelitian ini mengambil lokasi di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

Kepala Desa Sendangadi yaitu Drs. H. Damanhuri, MBA. MM memiliki inovasi yaitu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dengan dana desa, yang bersifat kegiatan produktif, kegiatan ini berupa pelatihan dalam keterampilan masyarakat sendangadi. Pelatihan yang dilakukan guna membangun manajemen dalam pemberdayaan masyarakat. Alasan lain kenapa penelitian tersebut dilakukan pada desa ini, karena Desa Sendangadi merupakan daerah yang sedang mengalami perkembangan dengan pesat, selain daerah geografisnya yang sangat strategis dan

berada pada jalur lalu lintas transportasi antar kota, daerah ini juga menjadi salah satu desa inklusi sekabupaten sleman.

Desa Sendangadi dapat dikatakan sebagai desa yang mulai berkembang sejak Damanhuri sebagai kepala desa, inovasi yang dipegang teguh oleh Damanhuri sebagian telah terealisasikan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat melalui prestasi yang telah mereka capai. Prestasi ini yang membuat Desa Sendangadi menjadi desa yang berkembang, mandiri, dan kreatif. Berikut adalah pencapaian prestasi yang telah di dapatkan Desa Sendangadi:

Tabel 1.1 Prestasi Desa Sendangadi

No	Juara	Bentuk Prestasi	Tingkat
1.	I	Pokja I Kegiatan PKDRT	Kabupaten
2.	III	PKK	Kabupaten
3.	III	UP2H	Kabupaten
4.	III	Desa Unggulan Berbudaya Terbaik	Kabupaten
5.	Harapan II	Desa Siaga	Kabupaten
6.	Harapan I	Posyandu	Kabupaten
7.	II	PAAR	Provinsi
8.	II	Lomba Memasak	Kabupaten
9.	IV	Liga Remaja ke-13	Kecamatan
10.	II	Lomba Tumpeng	Padukuhan
11.	IV	Futsal	Padukuhan
12.	II	Kebersihan Lingkungan	Padukuham
13.	II	Gobak Sodor	Kecamatan
14.	III	Festifal Sepak Bola antar SSB	Kabupaten
15.	I	Mewarnai	Kecamatan

Sumber: Desa Sendangadi

Berangkat dari hal tersebut, membuat saya tertarik untuk menjadikan Desa Sendangadi sebagai objek penelitian. Melihat inovasi kepala desa yang memang memfokuskan dalam pemberdayaan masyarakat itu sendiri yang telah mengasilkan prestasi seperti data diatas saya juga tertarik dalam perkembangan Desa sendangadi didalam wewenang Damanhuri yang baru menjabat sebagai kepala desa selama tiga tahun serta inovasi ini dapat meningkatkan keuntungan bagi masyarakat itu sendiri.

Kepala Desa Sendangadi mengharapkan dengan diadakannya inovasi saya dalam pemberdayaan masyarakat ini mampu memberikan kesan baik dalam memimpin masyarakat desa sendangadi, dan dapat mengelola sumber daya desa secara optimal seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya modal dari fenomena diatas peneliti tertarik untuk meneliti tentang sejauh mana peran kepemimpinan kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat dengan mengambil judul “ **Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat**” (Studi Kasus: **Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Tahun 2015**).

B. Rumusan Masalah

Memperhatikan uraian di atas maka permasalahan yang menjadi focus perhatian penulis dalam penelitian adalah sebagai berikut:

Bagaimana peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Tahun 2015?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan, sebagai berikut:

Untuk menggambarkan peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat Des Sendangdi Kecamatan Mlati Kabutapen Sleman.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis:

Penelitian ini diharapkan menambah keragaman literatur dan referensi pada perpustakaan Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, khususnya literatur dan referensi studi tentang kepemimpinan dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga, menjadi pembanding dari penelitian-penelitian lain dan memberi sedikit solusi untuk penelitian berikutnya yang masih relevan.

2. Secara Praktis:

Penelitian diharapkan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah atau dinas instansi terkait, khususnya pemerintah daerah Yogyakarta dan pemerintahan desa sendiri dalam monitoring dan mengevaluasi keberhasilan serta kendala-kendala yang dihadapi untuk pelaksanaan program-program pemberdayaan masyarakat di masa-masa mendatang.

E. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka merupakan landasan sebagai acuan kerangka berfikir untuk mengkaji masalah yang menjadi saran sebuah penelitian. Tinjauan pustaka berfungsi untuk mengembangkan pemahaman yang menyeluruh terhadap penelitian

sebelumnya, menghindari pendekatan analisa yang sama, mengetahui apa saja peneliti yang pernah dilakukan sebelumnya, membatasi ruang lingkup penelitian.

Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Ryan Permana (2014).	Peran Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Pembangunan Di Desa Long Beliu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau.	Penelitian terdahulu ingin mendeskripsikan dan mengetahui bagaimana peran kepemimpinan kepala desa dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Long Beliu Kecamatan Kelay Kabupaten Berau. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa sarana prasarana yang berada di desa ini dapat dikatakan urang baik, seperti kurangnya gedung sekolah sehingga anak-anak tidak dapat bealajar dengan semestinya. Meskipun dalam pelaksanaannya masih kurang baik namun kepala des teteap ingin memberikan yang terbaik bagi masyarakatnya.
2.	Catur Puspita Sari (2014)	Peran Kepemimpinan Kepala Desa dan Pemberdayaan Masyarakat di Desa Bawuran Kecamatan Pleret Kabupaten Bantul Tahun 2014	Hasil dari penelitian tersebut bahwa masyaraat Desa Bawuran cenderung tidak tertarik dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan banyak bekerja. masih belum efektif dalam pencapaian tujuan. Hal ini terjadi karena masih kurangnya kesadaran masyarakat desa dalam mendirikan desa yang makmur. Karena kurangnya fasilitas dan peralatan teknologi Sehingga dalam pengelolaannya kepala desa sendiri cenderung tidak dapat menjalankan perannya

			sehingga belum tercapai target dalam memperdayakan masyarakat tentunya mempengaruhi dalam menjalankan manajemen di desa Bawuran.
3.	Nur Wahyu Lanjar Prihantanto (2012)	Peran Camat Dalam Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Perekonomian, Pendidikan dan Kesehatan di Kecamatan Sewon Tahun 2012	Upaya camat dalam pemberdayaan masyarakat di kecamatan Sewon dikatakan sudah baik. Hal ini ditunjukkan dengan adanya beberapa perubahan dan terobosan yang sangat dirasakan oleh masyarakat melalui program-program yang mendukung. Tujuan camat dengan adanya program pemberdayaan yaitu untuk mensejahterakan masyarakat khususnya masyarakat menengah kebawah.
4.	Moch. Fadli Ladua dkk (2016)	Peran Pemerintah Desa Dalam Pemberdayaan Masyarakat Tani di Desa Boyong Pante Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan.	Berdasarkan hasil penelitian peran pemerintah desa dalam pemberdayaan masyarakat tani belum dapat dikatakan berhasil dan tidak sesuai dengan yang diharapkan. Karena tidak adanya kesadaran dari pemerintah untuk mampu melaksanakan peranan sesuai dengan peraturan undang-undang yang telah ditetapkan agar perkembangan masyarakat dapat dikatakan baik.

Sumber : repository umy

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian saya berada pada obyeknya yaitu Peran Kepala Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat perbedaan yang mencolok pada penelitian terdahulu dengan penelitian saya melihat pada adanya partisipasi

masyarakat terhadap program-program yang ada di desa dan bagaimana memberikan motivasi positif agar masyarakat desa dapat berproses baik dengan adanya kegiatan dan program-program di desa, sehingga dalam hal pemberdayaan masyarakat, kepala desa dapat dikatakan berhasil dalam memberikan arahan positif untuk menjadikan desa lebih maju dan makmur.

F. Kerangka Teoritik

Kerangka teori merupakan gambaran dari teori- teori yang berhubungan erat dengan masalah yang diteliti sehingga penelitian menjadi jelas, sistematis dan ilmiah. Teori adalah serangkaian asumsi, konsep, abstrak, definisi dan preposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial dan fenomena alami yang menjadi pusat perhatian. Oleh karena itu, dalam penelitian terdapat teori yang akan dipaparkan sebagai berikut :

1. Peran

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), peranan adalah bagian yang dimainkan seorang pemain. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Peranan sebagai seperangkat harapan- harapan yang dikenakan individu yang menempati kedudukan sosial tertentu Eachery (2010). Menurut Suhardono (1994) adapun makna dari kata “peran” dapat di jelaskan lewat beberapa cara. Pertama, suatu penjelasan historis menyebutkan konsep peran semula di pinjam dari kalangan drama atau teater yang hidup subur pada zaman Yunani atau Romawi.

Dalam arti ini, peran menunjuk pada sebuah pentas drama yang ada. Kedua, suatu penjelasan yang mengarah pada konotasi ilmu sosial, yang mengartikan peran

adalah sebagai suatu fungsi yang dibawakan oleh seseorang ketika menduduki suatu karakterisasi (posisi) dalam struktur sosial. Ketiga, suatu penjelasan yang lebih mengarahkan dan bersifat operasional, menyebutkan bahwa peran seorang aktor adalah suatu batasan yang dirancang oleh aktor lain, yang kebetulan sama-sama berada dalam satu penampilan atau unjuk peran (role performance). Hubungan antara pelaku atau aktor dan pasangan peran lainnya (role partner) bersifat saling terkait serta saling mengisi dan memiliki arti tersendiri bagi setiap perannya, karena dalam konteks sosial, tak suatu peran pun dapat berdiri sendiri tanpa yang lainnya.

Menurut Hunt (2014) peran (role) adalah perilaku yang diharapkan dari seseorang yang memiliki suatu status. Pada kerangka besar, organisasi masyarakat atau yang memiliki suatu status. Pada kerangka besar, organisasi masyarakat atau yang disebut sebagai struktur sosial ditentukan oleh hakekat (nature) dari peran – peran ini, hubungan antara peran-peran tersebut serta distribusi sumber daya yang langka diantara orang-orang yang memainkannya.

Menurut Susanto (2014) mengenai definisi peranan diungkapkan sebagai berikut:

- a. Peranan adalah meliputi nama-nama yang dihubungkan dengan kedudukan seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan peraturan yang membimbing seseorang untuk menjalankan kehidupan sebagai masyarakat semestinya.
- b. Peranan adalah suatu konsep perihal apa saja yang sedang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasinya.

c. Peranan dapat juga diartikan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial.

Menurut Soekanto (2007) mendefinisikan peranan (*role*) adalah sebagai berikut:

“Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan”. Lebih jauh bahwa Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa peranan memiliki paling sedikit tiga hal arti, diantaranya yaitu :

a. Peranan meliputi saran, motivasi yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam bermasyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam menjalankan kehidupannya sebagai masyarakat.

b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu serta dapat dilakukan bersama dalam masyarakat sebagai organisasi.

c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.

1.1. Pelaksanaan Peran

Berdasarkan pelaksanaannya menurut Suyanto (2006) peran dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Peranan yang diharapkan (*expectec roles*) : cara ideal dalam pelaksanaan peranan menurut penilaian masyarakat. Masyarakat menghendaki peranan yang diharapkan dilaksanakan secermat- cermatnya dan peranan ini tidak dapat ditawar dan harus

dilaksanakan seperti yang ditentukan. Peranan jenis ini antara lain peranan hakim, peranan protokoler diplomatik, dan sebagainya.

b. Peranan yang disesuaikan (*actual roles*), yaitu cara bagaimana sebenarnya peranan itu dijalankan. Peranan ini pelaksanaannya lebih luwes, dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi tertentu. Peranan yang disesuaikan mungkin tidak cocok dengan situasi setempat, tetapi kekurangan yang muncul dapat dianggap wajar oleh masyarakat.

2. Peran Kepala Desa

Di Indonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa. Menurut H. A. W. Widjaja (2008) Desa adalah: “Suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak untuk menyelenggarakan rumah tangganya dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menurut Syahril (2010) peran kepala desa dapat dilihat dari perilaku dirinya sebagai kepala desa, dapat dilihat dari dua pendekatan yaitu:

1. Kemampuan kepala desa dalam memotivasi masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa secara partisipatif.
2. Kemampuan kepala desa terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan masyarakat desa melalui kegiatan.

Desa memiliki wewenang yang sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa pada BAB III Kewenangan Desa yakni:

1. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul Desa.
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota yang diserahkan pengaturannya kepada Desa, yakni urusan pemerintahan yang secara langsung dapat meningkatkan pelayanan masyarakat.
3. Tugas pembantuan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota.
4. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan Perundang-undangan diserahkan kepada Desa.

Tujuan pembentukan desa adalah untuk meningkatkan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna dan peningkatan pelayanan terhadap masyarakat sesuai dengan tingkat perkembangan dan kemajuan pembangunan. Dalam menciptakan pembangunan hingga di tingkat akar rumput maka terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk pembentukan desa, yakni :

- a. Faktor penduduk, minimal 2500 jiwa atau 500 Kepala Keluarga.
- b. Faktor luas, yang terjangkau dalam pelayanan dan pembinaan masyarakat.
- c. Faktor letak, yang memiliki jaringan perhubungan atau komunikasi antar dusun.

- d. Faktor sarana dan prasarana, tersedianya sarana perhubungan pemasaran, sosial, produksi, dan sarana pemerintahan desa.
- e. Faktor sosial budaya, adanya kerukunan hidup beragama dan kehidupan bermasyarakat dalam hubungan adat istiadat.
- f. Faktor kehidupan masyarakat, yaitu tempat untuk keperluan mata pencaharian masyarakat.

Menurut Sunardjo (2004) kepala desa adalah penyelenggara dan penanggung jawab utama di bidang pemerintahan, pembangunan, kemasyarakatan, dan urusan pemerintahan umum termasuk pembinaan ketentraman dan ketertiban. Disamping itu kepala desa juga mengemban tugas membangun mental masyarakat desa baik dalam bentuk menumbuhkan maupun mengembangkan semangat membangun yang dijiwai oleh asas usaha bersama dan kekeluargaan.

Sedangkan menurut Subakti (2005) dalam skripsi nensy peran kepala desa adalah penguasa tunggal dalam pemerintahan desa dalam melaksanakan dan menyelenggarakan urusan rumah tangga desa dan disamping itu ia menyelenggarakan urusan-urusan pemerintah, meskipun demikian di dalam melaksanakan tugasnya kepala desa mempunyai batas-batas tertentu, tidak dapat menuruti keinginannya sendiri.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kepala desa adalah orang yang bergerak lebih awal, memelopori, mengarahkan, membimbing, menuntun dan menggerakkan masyarakatnya melalui pengaruhnya dan sekaligus melakukan pengawasan terhadap tingkah laku masyarakat desa yang dipimpinnya.

Pemilihan kepala desa bertujuan untuk memilih calon kepala desa yang bersaing dalam pemilihan kepala desa untuk dapat memimpin desa. Pemilihan kepala desa dilakukan secara langsung oleh masyarakat desa yang terdaftar dengan memilih langsung calon kepala desa yang dianggap oleh masyarakat mampu membawa aspirasi masyarakat dan pembangunan desanya. Pemilihan kepala desa diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang desa yang diatur dalam pasal 46 ayat 1 dan 2, yakni:

- 1) Kepala desa dipilih langsung oleh penduduk desa dari calon yang memenuhi syarat.
- 2) Pemilihan kepala desa bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Kepala Desa dipilih berdasarkan asas umum, bebas, langsung dan rahasia oleh penduduk desa warga Negara Indonesia yang berumur kurang lebih 17 tahun atau pernah kawin. Dalam rangka pemilihan Kepala Desa yang dimaksud dengan asas umum, bebas, langsung dan rahasia adalah sebagai berikut :

- 1) Asas Langsung berarti memilih mempunyai hak suara langsung memberikan suaranya menurut hati nuraninya tanpa perantara dan tanpa tingkatan.
- 2) Asas Umum berarti pada dasarnya semua penduduk desa WNI yang memenuhi persyaratan sekurang-kurangnya telah berusia 17 tahun ataupun telah/pernah kawin berhak memilih dalam pemilihan Kepala Desa. Jadi, pemilihan bersifat umum berarti pemilihan yang berlaku menyeluruh bagi semua penduduk desa warga Negara Indonesia menurut persyaratan tertentu tersebut di atas.

3) Asas Bebas berarti pemilih dalam menggunakan haknya dijamin keamanannya untuk menetapkan pilihannya sendiri tanpa adanya pengaruh tekanan dari siapapun dan dengan apapun.

4) Asas Rahasia berarti pemilih dijamin oleh peraturan perundang-undangan bahwa suara yang diberikan dalam pemilihan tidak akan diketahui oleh siapapun dan dengan jalan apapun.

Disamping menyelenggarakan rumah tangga sendiri, pemerintah desa harus melaksanakan tugas-tugas pemerintahan umum. Tugas tersebut akan melekat kepada peranan kepala desa, karena kepala desa merupakan penanggung jawab tetap di bidang pemerintahan, pembinaan masyarakat dan pembangunan.

Berdasarkan pasal 26 undang-undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang desa yang dinyatakan bahwa Kepala Desa bertugas dalam peran menyelenggarakan Pemerintah desa, pembinaan kemasyarakatan, melaksanakan pembangunan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Dalam melaksanakan kewajiban peran kepala desa sebagai penguasa tunggal, memiliki wewenang penting yaitu:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintah dan masyarakat desa.
- 2) Mengangkat dan memberhentikan perangkat desa.
- 3) Menetapkan peraturan desa.
- 4) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan asset desa.
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa.
- 6) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa.
- 7) Menetapkan anggaran pendapatan dan belanja desa.

- 8) Mengembangkan sumber pendapat desa.
- 9) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikan agar mencapai perekonomian skala produktif sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat desa.
- 10) Memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 11) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif.
- 12) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 13) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan Negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
- 14) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Kewajiban Peran Kepala Desa adalah:

- a) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati atau Walikota.
- b) Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan dan Drsa setiap akhir tahun anggaran.
- c) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintah desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati atau Walikota.
- d) Memberikan atau menyebar informasi penyelenggaraan pemerintah secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran.

Selain kewajiban yang sudah di paparkan di atas, peran kepala desa juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada Bupati atau Walikota, memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada masyarakat.

3. Pemberdayaan Masyarakat Desa

3.1 Pemberdayaan

Secara epistemologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Bertolak dari pengertian tersebut, makna pemberdayaan yaitu sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya Widjajanti (2014).

Desa merupakan suatu wilayah yang ditempati oleh beberapa penduduk sebagai kesatuan masyarakat yang memiliki organisasi dalam hukum pemerintahan terendah langsung yang berada dibawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam konsep pemberdayaan tersebut, terkandung pemahaman bahwa pemberdayaan tersebut diarahkan terwujudnya masyarakat madani (yang beradab) dan dalam pengertian dapat mengambil keputusan (yang terbaik) bagi kesejahteraannya sendiri. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk memperkuat kemampuan (*capacity strengthening*) masyarakat, agar mereka dapat berpartisipasi

secara aktif dalam keseluruhan proses pembangunan, terutama pembangunan yang ditawarkan oleh penguasa dan atau pihak luar yang lain Mardikanto (2014).

Dalam literatur pelayanan kemanusiaan (*human services*), Munandar (2014) menyatakan definisi pemberdayaan memiliki beberapa dimensi, yaitu :

- a. Proses pengembangan yang dimulai dengan pertumbuhan individual dan puncaknya adalah perubahan sosial yang lebih besar.
- b. Suatu keadaan psikologis yang ditandai oleh adanya peningkatan perasaan *self-esteem*, *efficacy*, dan kontrol.
- c. Pembebasan yang dihasilkan oleh gerakan sosial, yang dimulai dari pendidikan dan politisasi ketidakberdayaan masyarakat, kemudian melibatkan upaya- upaya kolektif dari ketidakberdayaan untuk memperoleh kekuasaan.

Beberapa ahli dibawah ini mengungkapkan definisi pemberdayaan dilihat dari tujuan, proses, dan cara- cara pemberdayaan:

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang- orang yang lemah dan tidak beruntung (Ife, Pemberdayaan Difabel dalam Pelaksanaan Program Kelompok Usaha Bersama (KUBE) di Desa Suruh, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganya, 2015).
- b. Pemberdayaan adalah sebuah proses yang mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan atas dan mempengaruhi terhadap kejadian- kejadian serta lembaga- lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan

dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya Parsons (2015).

c. Pemberdayaan menunjukkan pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial Levin (2015).

d. Pemberdayaan sebagai “suatu cara pandang seperti halnya hasil suatu keadaan, kebijakan dan tindakan” Block (2015).

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya yang dimiliki dhuafa dengan mendorong, memberikan motivasi dan meningkatkan kesadaran tentang potensi yang dimiliki mereka serta berupaya untuk mengembangkannya Sumohadiningrat (2015). Pemberdayaan berasal dari bahasa Inggris “*empowerment*” yang secara harfiah bisa diartikan sebagai “pemberkuasaan” dalam arti pemberian atau peningkatan kekuasaan (*power*) Hikmat (2015).

Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu sendiri dengan mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya Crescent (2015). Pemberdayaan adalah proses saling belajar diantara sesama warga masyarakat untuk sama-sama meningkatkan kesadaran diri secara kritis dan secara bersama pula membangun institusi-institusi yang resisten terhadap segala bentuk intervensi Negara kedalam wilayah masyarakat Suparna (2015).

Pemberdayaan merupakan upaya meningkatkan hakikat lapisan masyarakat dan pribadi manusia Sumaryadi (2011).

- a. Mendorong, memotivasi, meningkatkan kesadaran akan potensinya dan menciptakan iklim atau suasana untuk berkembang.
- b. memperkuat daya potensi yang dimilikinya dengan langkah- langkah positif memperkembangkannya.

3.1.1. Konsep Pemberdayaan

Tentang pemberdayaan dalam Firmansyah (2014) kajian- kajian konseptual yang menyajikan banyak indikator keberdayaan. Empat diantaranya menyangkut derajat keberdayaan, yaitu:

- a. Tingkat kesadaran dan keinginan untuk berubah (*power to*).
- b. Tingkat kemampuan meningkatkan kapasitas untuk memperoleh akses (*power within*).
- c. Tingkat kemampuan menghadapi hambatan (*power over*).
- d. Tingkat kemampuan kerjasama solidaritas (*power with*).

Untuk masyarakat bisa menjadi mandiri perlu adanya dukungan kemampuan berupa sumber daya manusia yang utuh dengan kondisi kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif serta sumberdaya lainnya yang bersifat material Ambar(2014). Secara konseptual pemberdayaan atau *empowerment* berasal dari kata *power* (kekuasaan atau keberdayaan). Menjangkau sumber- sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa yang mereka perlukan dan berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan- keputusan yang mempengaruhi mereka Suharto (2015).

3.1.2. Macam-macam Pemberdayaan

Pemberdayaan ini dilakukan berawal dari kebijakan dan perencanaan tindakan sosial, ekonomi dan politik secara langsung melalui pendidikan, pelatihan dan penyadaran diri. Prinsip utama pemberdayaan menurut Ife (2014) mempunyai 3 macam pemberdayaan yaitu :

- a. Pemberdayaan melalui kebijakan dan perencanaan, dilakukan dengan merubah struktur dan lembaga- lembaga yang ada agar terjadi akses yang sesuai dengan sumber- sumber dan pelayanan- pelayanan serta muncul partisipasi dalam kehidupan masyarakat.
- b. Pemberdayaan melalui aksi sosial dan politik, menekankan kepada pentingnya perjuangan dan perbuatan politik untuk meningkatkan keberdayaan yang lebih efektif, dimana masyarakat dapat dilibatkan untuk melakukan aksi- aksi langsung.
- c. Pemberdayaan melalui pendidikan dan penyadaran, menekankan pada pentingnya proses pendidikan sehingga pihak yang diberdayakan memperoleh kemampuan- kemampuan. Hal ini dilakukan dengan memberikan pengetahuan akan berbagai hal yang menjadi kendala baik struktural maupun kendala- kendala kemasyarakatan juga memberikan keterampilan untuk berkarya secara efektif untuk menuju perubahan.

Dalam pelaksanaannya menurut Kartasmita (2015) pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga cara, yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi individu dapat berkembang.

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah- langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik maupun sosial yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah.

c. Memberdayakan rakyat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah menjadi semakin lemah atau terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat.

3.2. Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat sebagai upaya yang disengaja untuk memfasilitasi masyarakat lokal dalam merencanakan, memutuskan dan mengelola sumber daya lokal yang dimiliki melalui *collective action* dan *networking* sehingga pada akhirnya mereka memiliki kemampuan untuk kemandirian secara ekonomi, ekologi dan sosial Supriyanto, Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Wakaf Uang, (2010).

Menurut Arif (2010) pemberdayaan masyarakat desa dapat dikatakan sebagai pengendalian masyarakat di desa agar tetap menjadi masyarakat yang rukun, saling membantu. Karena masyarakat desa identik dengan saling membantu serta gotong royong satu sama lain. Pemberdayaan masyarakat desa selalu di pantau oleh pemerintahan desa agar desa yang di huni oleh masyarakat dapat hidup lebih maju dan berkembang. Oleh karena itu pemberdayaan masyarakat sangat penting untuk dilakukan agar dapat memberikan pembelajaran positif bagi masyarakat desa dalam membangun desa yang maju dan lebih berkembang.

Definisi pemberdayaan masyarakat menurut UNDP, *Empowerment* (pemberdayaan atau penguatan) dianggap sebagai sebuah proses yang memungkinkan kalangan individual ataupun kelompok merubah keseimbangan kekuasaan dalam segi sosial, ekonomi maupun politik pada sebuah masyarakat ataupun komunitas. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk mendorong akselerasi penurunan angka kemiskinan yang berbasis partisipasi yang diharapkan dapat menciptakan proses penguatan sosial yang dapat mengantar masyarakat makin menuju masyarakat yang madani, sejahtera, berkeadilan serta berlandaskan iman dan takwa (Sumodiningrat, Efektifitas Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan Pada Kelompok Pinjaman Bergulir di Desa Mantren Kecamatan Karangrejo Kabupaten Magetan, 2012).

3.2.1 Konsep Pemberdayaan Masyarakat Desa

Konsep Pemberdayaan masyarakat desa menurut Arif (2010) yaitu:

- a. Mendorong orang menjadi lebih terlibat dalam membuat keputusan dan aktifitas yang mempengaruhi pekerjaannya.
- b. Menempatkan orang bertanggung jawab atas apa yang mereka kerjakan.
- c. Memiliki wewenang dan berinisiatif melakukan sesuatu yang dipandang perlu.
- d. Mendorong terjadinya inisiatif dan respon, sehingga semua permasalahan yang dihadapi dapat dipecahkan secepatnya dan se-fleksibel mungkin.

Secara umum, menurut Arif (2010) pola-pola pemberdayaan masyarakat baik yang dilakukan pemerintah dengan unsur-unsur non pemerintah kadang kala terbelit beberapa persoalan. Persoalan- persoalan tersebut diantaranya:

- a. Belum cukupnya jaringan kerja dan kerjasama (*networks and colaboration*) antara pemerintah dan *civil society* dalam upaya pemberdayaan masyarakat.
- b. Terbatasnya kapasitas mobilitas pemerintah dalam mobilisasi sumber daya yang ditujukan untuk pemberdayaan masyarakat.
- c. Terbatasnya kapasitas manajemen dan organisasi maupun sumber daya dari kelompok- kelompok swadaya masyarakat yang dilibatkan dalam program- program pemberdayaan masyarakat.
- d. Terbatasnya kemampuan masyarakat dalam pengelolaan pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
- e. Kurangnya jaringan kelembagaan dan akses masyarakat terhadap fasilitasi Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM).

Orientasi pemberdayaan masyarakat haruslah membantu masyarakat agar mampu mengembangkan diri atas dasar inovasi- inovasi yang ada, ditetapkan secara partisipatoris, yang pendekatan metodenya berorientasi pada kebutuhan masyarakat sasaran dan hal- hal yang bersifat praktis, baik dalam bentuk layanan individu maupun kelompok. Silkhondze, (2007).

Untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa secara umum dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip-prinsip dasar pendampingan masyarakat Karsidi (2007), sebagai berikut:

- a. Belajar Dari Masyarakat

Prinsip yang paling mendasar adalah prinsip bahwa untuk melakukan pemberdayaan masyarakat desa adalah dari, oleh, dan untuk masyarakat. Ini berarti

dibangun pada pengakuan serta kepercayaan akan nilai dan relevansi pengetahuan tradisional masyarakat serta kemampuan masyarakat untuk memecahkan masalah yang ada.

b. Pendampingan sebagai fasilitator

Konsekuensi dari prinsip pertama adalah perlunya pendamping menyadari perannya sebagai fasilitator dan bukannya sebagai pelaku atau guru. Untuk itu perlu sikap rendah hati serta kesediaan belajar dari masyarakat dan menempatkan warga masyarakat desa sebagai narasumber utama dalam memahami keadaan masyarakat itu sendiri. Pada penerapannya masyarakat dibiarkan mendominasi kegiatan. Kalaupun pada awalnya peran pendamping lebih besar, harus diusahakan agar secara bertahap peran itu bisa berkurang dengan mengalihkan prakarsa kegiatan- kegiatan pada warga masyarakat itu sendiri.

c. Saling Belajar dan Berbagi Pengalaman

Salah satu prinsip pendampingan untuk pemberdayaan masyarakat desa adalah pengakuan akan pengalaman dan pengetahuan lokal masyarakat. Hal ini bukanlah berarti bahwa masyarakat selamanya benar dan harus dibiarkan tidak berubah. Kenyataan objektif telah membuktikan bahwa dalam banyak hal perkembangan pengalaman dan pengetahuan lokal (bahkan tradisional) masyarakat tidak sempat mengejar perubahan- perubahan yang terjadi dan tidak lagi dapat memecahkan masalah- masalah yang berkembang.

Dalam Widjajanti (2011) kerangka pikir upaya pemberdayaan masyarakat harus dilakukan melalui tiga cara :

a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*). Disini titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Pemberdayaan adalah upaya membangun daya itu, dengan mendorong, memotivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.

b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Perkuatan ini meliputi langkah- langkah nyata dan menyangkut penyediaan berbagai masukan, serta pembukaan akses kepada berbagai peluang yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya.

c. Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Pada proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, oleh karena kurang berdayaan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi tidak berarti mengisolasi dan menutupi dari interaksi, karena hal itu bukan akan memperkuat justru melemahkan. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah dan persaingan yang tidak seimbang serta eksploitasi yang kuat akan yang lemah.

Proses pemberdayaan adalah suatu siklus atau proses yang melibatkan masyarakat untuk bekerjasama dalam kelompok formal ataupun nonformal untuk melakukan kajian masalah, merencanakan, melaksanakan dan melakukan evaluasi terhadap program yang telah direncanakan bersama. Proses pemberdayaan diukur

melalui kualitas dan kuantitas keterlibatan masyarakat mulai dari kegiatan kajian atau analisis masalah, perencanaan program, pelaksanaan program serta keterlibatan dalam evaluasi secara berkelanjutan. Keterlibatan fasilitator sebagai pelaku pemberdayaan dalam mengawal proses pemberdayaan merupakan sumber penting sebagai jalur untuk meraih keberdayaan masyarakat Sumodiningrat (2011).

3.2.2 Prinsip Dasar Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Sari (2014) ada tiga macam melalui partisipasinya yaitu:

1. Tumbuhnya Sikap Inovatif masyarakat desa dalam menerima ide-ide baru.
2. Terwujudnya kenyamanan dan ketertiban hidup masyarakat desa.
3. Tumbuhnya semangat masyarakat desa untuk mengembangkan kehidupan sosial berbudaya di desa.

Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah mengembangkan masyarakat khususnya kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab dan meningkatkan tingkat keberlanjutan.

G. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan pembantasan dari konsep yang digunakan agar memudahkan peneliti untuk mengoperasikan konsep tersebut dilapangan. dalam penelitian ini meliputi:

1. Peran Kepala Desa

Peran kepala desa meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan kedudukan atau posisi seseorang untuk menjaga perilaku yang baik dengan masyarakat desa dalam memberikan bentuk kegiatan sosialisasi. Arti peran kepala desa menjadikan bentuk teladan bagi kehidupan masyarakat desa untuk memberikan bentuk tanggung jawab terhadap kewajibannya sebagai kepala desa dalam memberikan bentuk motivasi kepada masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan desa. Peran kepala desa dalam pemberdayaan masyarakat desa dapat dilihat dari 2 aspek yaitu: pengontrolan dan partisipasi.

2. Pemberdayaan masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat desa adalah meningkatkan kemandirian dan kemakmuran masyarakat dalam bidang sosial budaya, dan lingkungan hidup agar dapat mudah berinteraksi dengan sesama masyarakat lainnya, serta menjadikan kehidupan masyarakat agar lebih nyaman, tertib dan berpartisipasi terhadap program yang ada. Pemberdayaan masyarakat desa dapat dikatakan sebagai pengendalian masyarakat di desa agar tetap menjadi masyarakat yang memiliki sifat inovatif dalam menerima kegiatan yang ada. Rukun dan saling membantu dalam pembangunan desa serta pemberdayaannya masyarakat agar lebih memahami pentingnya hidup sejahtera dan saling tolong menolong.

H. Definisi Oprasional

Adapun definisi operasional dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Pengontrolan:
 - a. Kemampuan kepala desa dalam memotivasi masyarakat desa tentang berpartisipasi dalam pembangunan desa yang partisipatif.
 - b. Kemampuan kepala desa terhadap penyelenggaraan kegiatan pemerintah dan masyarakat desa melalui kegiatan.
- 2) Partisipasi:
 - a. Terwujudnya kenyamanan dan ketertiban masyarakat desa.
 - b. Tumbuhnya semangat masyarakat desa untuk mengembangkan kehidupan sosial berbudaya di desa.

I. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, karena dengan metode penelitian kualitatif nantinya akan mampu menganalisis gejala sosial yang ada dalam masyarakat dan tidak hanya mencari apa yang harus dibenarkan dan banyaknya data yang dikumpulkan, akan tetapi lebih pada ketertarikan bentuk nyata secara ilmiah hasil dari penelitian tersebut.

Dalam Agus. S (2006) apapun model yang dipilih, hal terpenting yang harus dimiliki periset kualitatif adalah keterampilan kreativitas dan kekuatan improvisasi dalam melakukan wawancara. Disamping itu periset juga dituntut untuk

menunjukkan sikap yang fleksibel, objektif dan tidak cenderung mengadili. Pokok-pokok dari wawancara biasanya berkenaan dengan tiga tema yakni tingkah laku, sistem nilai dan perasaan objek penelitian.

Menurut Salim (2006) konsep penelitian kualitatif menunjuk dan menekankan pada proses, berarti tidak diteliti secara ketat atau terukur (jika memang dapat diukur). Didalam menghadapi fenomena yang diukur atau diteliti tidaklah secara ketat namun lebih bersifat realita yang dibangun antara periset dengan apa yang dipelajari. Dengan demikian, tentunya dalam metode penelitian ini lebih mengutamakan atas hal-hal yang benar-benar terjadi secara nyata. Peneliti berusaha menggambarkan secara jelas dan mendetail tentang objek atau kajian penelitian berdasarkan data-data yang terkumpul di lapangan dan diperkuat dengan sebuah studi literatur. Kemudian, dari hal tersebut dapat ditarik kesimpulan atas pokok permasalahan. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bersifat interpretatif (menggunakan penafsiran) yang melibatkan banyak metode dalam menelaahnya. Dalam penelitian kualitatif perhatiannya adalah terkait adanya perubahan kondisi dari waktu ke waktu yang menarik untuk digali secara terus menerus karena selalu mengalami perkembangan pemahaman.

Melalui metode penelitian ini, diharapkan akan membangun sebuah karya yang berbobot dan dapat dipertanggung jawabkan dengan tidak ada pihak yang merasa diuntungkan maupun dirugikan, namun hal ini hanya bersifat sebagai usaha mengetahui dan mempelajari keadaan yang terjadi di sekitar. Harapan dari adanya penelitian ini adalah dapat memberikan manfaat bagi informan, peneliti dan pembaca.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang akan dilakukan berada di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

3. Unit Analisis

Unit analisis yang akan dilakukan berada di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman. Setelah itu wawancara akan di dapatkan kembali di kantor Kecamatan Desa Sendangadi serta padukuhan yang berada di Desa Sendangadi.

4. Data dan Sumber Data

- a. Primer, merupakan data yang diperoleh secara langsung dari informan. Peneliti berusaha menggali segala bentuk informasi yang diperoleh langsung dari hasil pembicaraan atau wawancara.
- b. Sekunder, merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung, baik dari dokumen maupun data-data yang mendukung lainnya.

5. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengambilan data dimana peneliti langsung berdialog dengan responden untuk menggali informasi dari responden. Melalui wawancara mendalam, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Bahkan keduanya dapat dilakukan bersamaan, di mana wawancara dapat digunakan untuk menggali lebih dalam lagi data yang didapat dari observasi.

Menurut Rofiq (2013) wawancara yaitu suatu kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan informasi secara langsung dengan mengajukan pertanyaan antara pewawancara dengan yang diwawancarai. Ada beberapa jenis wawancara yang dapat digunakan, menurut Sudarwan dalam Rofiq (2013) berdasarkan strukturnya, pada penelitian kualitatif ada dua jenis wawancara yaitu; (1) wawancara relatif tertutup, di mana pertanyaan difokuskan pada topik khusus dan umum dan dibantu oleh panduan wawancara yang dibuat cukup rinci;(2) wawancara terbuka, di mana peneliti memberikan kebebasan diri untuk berbicara secara luas dan mendalam.

Tabel 2.1 Data Narasumber

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. H. Damanhuri, MBA, MM	Kepala Desa Sendangadi
2.	Parjiyono. S. Sos	Sekertaris Desa Sendangadi
3.	Isma Nur Pratama	Seksi Pemerintahan Desa Sendangadi
4.	H. Sunaryo. DH	Urusan Keuangan Desa Sendangadi
5.	Yunita	Staff Desa Sendangadi
6.	Dian Nurwitasari	Staff Desa Sendangadi
7.	Harjuno Priya H. S. Pd.	Seksi Pelayanan
8.	Sugeng Haryanto	Staff Desa Sendangadi
9.	Agustri	Masyarakat Desa Sendangadi
10.	Torik	Masyarakat Desa Sendangadi
11.	Ahmad	Ketua Rt Mraen
12.	Muslimatun	Masyarakat Desa Sendangadi
13.	Yosef	Masyarakat Desa Sendangadi
14.	Dodik	Ketua Difabel Desa

		Sendangadi
15.	Rodijah	Masyarakat Desa Sendangadi

b. Observasi

Menurut Rofiq, (2013) Observasi berasal dari kata *observation* yang berarti pengamatan. Dengan metode observasi peneliti dapat mengamati langsung perilaku, kejadian atau kegiatan perseorangan atau kelompok yang diteliti. Hasil dari pengamatan tersebut dilakukan untuk mengetahui kejadian yang sebenarnya terjadi. Dengan pengamatan langsung peneliti dapat melihat langsung kejadian sebagaimana subyek yang diamati mengalaminya, menangkap dan merasakan fenomena sesuai pengertian subyek, dan obyek yang diteliti. Observasi dilakukan di Desa Sendangadi Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan data yang dapat diambil penulis dari berbagai sumber yang dibukukan. Dapat berupa jurnal, buku, skripsi maupun laporan-laporan lain yang menunjang dalam penelitian.

Burhan, (2001) dalam Muhadjir (2006) Dokumentasi merupakan pengumpulan data untuk melihat/menelusuri data-data historis yang berupa buku, catatan, majalah dan lain-lain yang berhubungan dengan penelitian tentang program peningkatan keberdayaan masyarakat.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data kualitatif menurut Bogdan & Biklen (1982) dalam Moleong yang dikutip Bungin (2007) adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasi data, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Adapun menurut Patton (1980: 268) dalam Moleong (2014: 280), analisa data digambarkan sebagai proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.

Dalam penelitian kali ini, peneliti berusaha untuk mengelompokkan data yang diperoleh kemudian disederhanakan. Hal ini disesuaikan dengan data yang terkumpul kemudian diolah menjadi sebuah analisis. Data yang disajikan juga berupa jawaban dari permasalahan yang ada. Kemudian, Peneliti akan menarik sebuah kesimpulan sesuai dengan data yang diperoleh dilapangan. Analisis data dilakukan dengan cara :

1. Pengumpulan data

Pengumpulan data dalam hal ini berupa data-data mentah dari hasil penelitian, seperti: hasil wawancara, dokumentasi, catatan lapangan dan sebagainya.

2. Reduksi data

Setelah data terkumpul dari hasil pengamatan, wawancara, catatan lapangan, serta bahan-bahan data lain yang ditemukan di lapangan dikumpulkan dan diklasifikasikan dengan membuat catatan-catatan ringkasan, mengkode untuk menyesuaikan menurut hasil penelitian.

3. Penyajian data (*display data*)

Data yang sudah dikelompokkan dan sudah disesuaikan dengan kode kodenya, kemudian disajikan dalam bentuk tulisan deskriptif agar mudah dipahami secara keseluruhan dan juga dapat menarik kesimpulan untuk melakukan penganalisisan dan penelitian selanjutnya.

4. Kesimpulan atau Verifikasi

Hasil penelitian yang telah terkumpul dan terangkum harus diulang kembali dengan mencocokkan pada reduksi data dan *display data*, agar kesimpulan yang telah dikaji dapat disepakati untuk ditulis sebagai laporan yang memiliki tingkat kepercayaan yang benar.